

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada abad sekarang ini perkembangan teknologi berkembang begitu cepat. Sebuah keniscayaan bahwa teknologi dapat membantu mengoptimalkan pekerjaan manusia di semua sektor. Penggunaan teknologi dalam bidang pemerintahan yang selanjutnya disebut *e-government* merupakan amanat dari Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Tidak bisa dipungkiri perkembangan teknologi ini juga menjadi sebuah kebutuhan dalam pemerintahan (Nugroho & Purbokusumo, 2020).

Dikutip dari laman menpanrb.go.id hasil *United Nations E-Government survey* dilakukan oleh PBB pada tahun 2024 Indonesia mengalami peningkatan yang cukup baik yakni dari peringkat 77 di tahun 2022 menjadi peringkat 64 di tahun 2024 dengan skor 0,7991 dengan kategori *Very High E-Government Development Index*. *United Nations E-Government Survey 2024* mengangkat tema "*Accelerating Digital Transformation for Sustainable Development*". Tujuan dari adanya indeks ini bertujuan membantu negara-negara anggota mengidentifikasi kekuatan dan tantangan masing-masing dalam implementasi pemerintah digital (Sabani et al., 2019).

Realitanya di Indonesia walaupun sudah menerapkan *e-government* masih dinilai kurang maksimal. Hal tersebut disebutkan oleh Presiden Jokowi pada *GOVTECH Release* pada 27 Mei 2024 di Istana Negara bahwasanya penggunaan aplikasi yang semula merupakan inovasi yang dikembangkan oleh pemerintah

sudah sangat menjamur dan tidak saling terintegrasi sehingga penyelenggaraan pemerintah semakin tidak efektif dan efisien. Sejauh ini menunjukkan bahwa tujuan Implementasi *e-government* masih berkuat pada jumlah aplikasi yang dibuat oleh pemerintah daerah maupun pusat. Padahal dalam artian yang lebih luas Implementasi *e-government* mempunyai *outcome* agar tercipta tata kelola pemerintah yang baik (Nurita, 2016).

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjadi dasar bagi semua Badan ataupun Pejabat Pemerintahan di pusat dan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan, penyelenggaraan dan administrasi pemerintahan sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Efektivitas penyelenggaraan pemerintah mengacu pada bagaimana implementasi kebijakan sesuai dengan aturan yang dibuat, melalui sumber daya, sarana dan prasarana yang ada.

Keberhasilan efektivitas penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan ditunjukkan dari segi tercapai atau tidaknya sasaran yang telah ditetapkannya dengan indikator yang dapat menunjukkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri. Efektivitas penggunaan teknologi ini seharusnya tidak hanya untuk mengikuti zaman saja namun tujuan dari penggunaannya adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Rafiqi et al., 2018).

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengartikan *Good Governance* merupakan suatu proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan *public goods and services*. Yang selanjutnya hasil penyelenggaraan pemerintahan

tersebut dapat ditinjau apakah pemerintah telah berjalan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan. *Good Governance* merupakan suatu alur dalam proses pengambilan keputusan dan juga bagaimana keputusan itu ditentukan, dibuat dan diterapkan. *Good Governance* menampilkan tidak hanya *output* tetapi *outcome* dari proses penyelenggaraan pemerintahan itu menuju yang lebih baik (Iwan Darmansjah, 2007).

Good Governance seperti yang dikemukakan oleh *United Nations Development Programme* memiliki karakteristik sebagai berikut : *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, strategic vision*. Dari karakteristik yang dikemukakan oleh UNDP tersebut, Suaib (2016:147) dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Kebijakan Publik”, prinsip utama dari *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum. Berdasar pada prinsip tersebut, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah selayaknya menerapkan prinsip tersebut pada penyelenggaraan pemerintahan agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (Cahyono, 2023).

Kota Bekasi yang merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan cepat di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan *public goods*. Ketersediaan *public goods* yang layak merupakan merupakan elemen penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Barang publik, seperti udara bersih, pendidikan, dan infrastruktur, harus dapat diakses oleh semua orang tanpa mengurangi manfaat bagi pengguna lainnya. Meskipun mengalami perkembangan ekonomi dan urbanisasi yang cepat, masalah-masalah seperti infrastruktur yang

memadai, banjir, kemacetan lalu lintas, kualitas layanan publik menjadi isu utama yang harus diatasi (Andhika, 2017).

Berikut beberapa masalah pembangunan yang ada di Kota Bekasi :

1. Banyak jalan dan jembatan di Kota Bekasi dalam kondisi rusak atau tidak terawat. Hal ini menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi barang sehingga laju perekonomian juga terhambat (Bachtariza et al., 2021).
2. Kota Bekasi rentan terhadap banjir, terutama saat musim hujan. Sistem drainase yang buruk dan penurunan permukaan tanah akibat eksploitasi air tanah berkontribusi pada masalah ini (Septian et al., 2023).
3. Pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi tanpa diimbangi dengan peningkatan kapasitas jalan menyebabkan kemacetan parah, terutama pada jam sibuk serta ketersediaan transportasi umum di Kota Bekasi belum terintegrasi dan tidak optimal.. Data menunjukkan bahwa waktu tempuh rata-rata meningkat drastis akibat kemacetan (Rintawatia et al., 2023).
4. Kualitas Pendidikan dan Kesehatan : Meskipun akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan meningkat, kualitasnya masih menjadi tantangan. Banyak sekolah dan fasilitas kesehatan yang belum memenuhi standar yang diperlukan untuk memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat (Nopiani., 2019).

Berikut adalah tabel data terkait masalah pembangunan yang ada di Kota Bekasi.

Tabel 1.1 Masalah Pembangunan

No	Deskripsi Masalah	Data terkait
1.	Banyaknya Jalan yang rusak	- Pemeliharaan jalan lingkungan terealisasi 187, 12 km dari 4161,29 km atau hanya 4,49 % (LKIP DBMSDA tahun 2023).
2.	Masih terdapat jalan yang belum diaspal	- Pembangunan jalan baru terealisasi hanya 6, 95 km yang idealnya 340,61 km berarti hanya 2,04 % jalan baru yang dibangun (LKIP DBMSDA tahun 2023)
3.	Kondisi lampu penerangan jalan yang mati	- Hanya ada 8150 titik dari 56.255 titik lampu yang dipelihara pada tahun 2023 (LKIP DBMSDA tahun 2023).
4.	Masih banyaknya kawasan kumuh di Kota Bekasi	- Target dari capaian kinerja DPKPP dalam menangani kualitas kawasan permukiman hanya sebesar 73, 81 % (LKIP DPKPP tahun 2023).
5.	Banjir	- Wilayah tentan terhadap banjir akibat curah hujan tinggi dan drainase buruk sekitar 66,81% (Hafizhan, 2020).
6.	Kemacetan lalu lintas yang mengakibatkan waktu tempuh semakin meningkat di Kota Bekasi	- Pengemudi berkisaran antara 45 – 52.2 km/jam (Rintawatia et al., 2023), sedangkan menurut Permen PU No 19/PRT/M/2011 fungsi jalan arteri primer yang seharusnya untuk kecepatan 60 – 120 km/jam.
7.	Kurangnya transportasi massal yang terintegritas	- Belum optimalnya Bus Transpatriot yang dinilai tidak membantu mobilitas warga di Kota Bekasi secara baik (Sahara et al., 2022)
7.	Fasilitas Pendidikan yang kurang memadai	- Realisasi capaian Pembangunan fasilitas bangunan pendidikan dengan kategori baik hanya mencapai 24, 86 % dari 100 % (LKIP DPKPP tahun 2023)
8.	Fasilitas saran dan prasarana yang kurang memadai	- Realisasi capaian pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana Kesehatan dengan kategori baik hanya mencapai 25 % (LKIP DPKPP tahun 2023)

Sumber : diolah oleh peneliti.

Pemerintah Daerah Kota Bekasi melalui Sekretariat Daerah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menyampaikan pertimbangan teknis dan/atau administratif kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota terkait kebijakan-kebijakan strategis daerah berdasarkan laporan pencapaian pelaksanaan tugas perangkat daerah secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan. Peraturan Walikota Nomor 99 Tahun 2021 Pasal 15 menyebutkan bahwa Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bekasi mempunyai tugas untuk melaksanakan fasilitasi monitoring, verifikasi, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pembangunan yang selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah (Rahmatiah, 2017).

Sekretaris Daerah sebelum menyampaikan pertimbangan teknis, rencana aksi, maupun kebijakan lain terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan kepada Wali Kota maupun Wakil Wali Kota membutuhkan bahan laporan yang sebelumnya telah difasilitasi oleh Bagian Pembangunan terkait pengendalian, evaluasi dan laporan pelaksanaan pembangunan. Laporan tersebut berisi realisasi fisik dan keuangan pada subkegiatan/kegiatan untuk melihat keseimbangan, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan di seluruh perangkat daerah (Maghfiroh, 2016).

Pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan pemerintah secara efektif, efisien dan tepat sasaran memerlukan pendekatan administrasi yang tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menganut prinsip-prinsip *good governance* (Mardiasmo, 2002:18). Oleh karena itu, dibutuhkan laporan pelaksanaan kegiatan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan guna

mengukur sejauh mana kegiatan pemerintah yang tepat sasaran antara perencanaan dan realisasi fisik maupun anggarannya. Dalam rangka menjamin tertib administrasi dan laporan yang bisa dipertanggungjawabkan, Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bekasi membuat sebuah Sistem Pelaporan Pembangunan atau yang biasa disingkat Simpelbang (Nugraha, 2022).

Adapun terkait implementasi Simpelbang telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan/SubKegiatan Pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi melalui Sistem Pelaporan Pembangunan, dimana ruang lingkup Simpelbang meliputi pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dengan melihat progres/realisasi fisik, keuangan/anggaran pelaksanaan subkegiatan/kegiatan dan pelaksanaan barang/jasa. Maksud dan tujuan dari dibentuknya sistem ini yakni menjamin ketersediaan data progres/realisasi pelaksanaan kegiatan yang *real time*, konsisten serta dapat dipertanggungjawabkan, sebagai upaya mengefektifkan dan mengefisiensikan mekanisme pengendalian, evaluasi dan pelaporan progres/realisasi pelaksanaan kegiatan (Riswati, 2021).

Berdasarkan *preliminary research* yang saya lakukan, sebelum adanya Simpelbang kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan dilakukan tidak secara efektif dan efisien sehingga menghambat tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang akan dibuat sebagai tugas dan fungsi yang diamanahkan sesuai dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Simpelbang dibuat

untuk memudahkan pelaporan kegiatan, dimana data bisa diperbaharui secara langsung, selain itu data ditampilkan pada situs web yang bisa diakses oleh operator Simpelbang perangkat daerah se Kota Bekasi dan juga masyarakat. Perumusan kebijakan dalam penanganan masalah pembangunan juga seharusnya bisa optimal dilakukan dengan adanya Simpelbang yang dapat menghimpun serta menyajikan data laporan pembangunan secara aktual dan faktual (Ninla Elmawati Falabiba, 2019).

Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pengembangan *e-Government*. Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang dimaksud telah mengembangkan Sistem Pelaporan Pembangunan.

Dalam pelaksanaan Simpelbang seharusnya tetap memperhatikan prinsip-prinsip *good governance* seperti yang tertera pada bagian menimbang Peraturan Walikota Bekasi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan/Sub kegiatan Pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi melalui Sistem Pelaporan Pembangunan, disebutkan bahwa dalam rangka menjamin tercapainya tujuan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan yang efisien, efektif dan tepat sasaran diperlukan administrasi pelaksanaan pembangunan yang tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip *Good Governance* (Saputra & Widiyarta, 2021).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melihat sejauh mana Implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* dalam melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan menggunakan Sistem Pelaporan Pembangunan, sebagaimana prinsip *Good Governance* menurut Sedarmayanti (2009) yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum. Maka dari itu peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Implementasi *Good Governance* pada Sistem Pelaporan Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Bekasi”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas maka dirumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi *Good Governance* pada Sistem Pelaporan Pembangunan Pemerintah Kota Bekasi ?
2. Bagaimana efektivitas penggunaan Sistem Pelaporan Pembangunan di Lingkup Pemerintah Kota Bekasi ?
3. Bagaimana persepsi organisasi perangkat daerah Sistem Pelaporan Pembangunan di Lingkup Pemerintah Kota Bekasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Implementasi *Good Governance* pada Sistem Pelaporan Pembangunan Pemerintah Kota Bekasi.
2. Menganalisis efektivitas penggunaan Sistem Pelaporan Pembangunan di Lingkup Pemerintah Kota Bekasi.

3. Menganalisis persepsi organisasi perangkat daerah Sistem Pelaporan Pembangunan di Lingkup Pemerintah Kota Bekasi.

1.4 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang pernah ada sebelumnya, maka peneliti membagi signifikansi menjadi dua hal, yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

1.4.1 Signifikansi Akademik

Beberapa penelitian tentang Implementasi prinsip *good governance* pada penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah banyak dilakukan namun peneliti belum menemukan penelitian tentang Implementasi *Good Governance* Pada Sistem Pelaporan Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Berikut beberapa referensi yang peneliti sertakan berupa jurnal, skripsi dan buku.

Rujukan pertama adalah jurnal yang ditulis oleh Andi Ni'mah Sulfiani tahun 2021 dengan judul Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo. Implementasi *good governance* dapat dijadikan sebagai bagian dari usaha untuk melaksanakan asas-asas demokrasi dan demokratisasi yang mencerminkan pemenuhan hak-hak rakyat oleh pemimpin, nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, serta adanya penegakan hak asasi dalam berbagai aspek kehidupan negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami permasalahan mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo. Salah satu masalah yang terjadi yaitu kurangnya

keterbukaan terhadap informasi terkait iuran dan denda yang harus dibayar oleh peserta BPJS. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis masalah terkait dengan prinsip-prinsip *good governance* dengan menggambarkan suatu fakta yang ada di Kantor Cabang BPJS Kesehatan di Kota Palopo yaitu banyaknya keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pegawai kantor BPJS tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara langsung dan dokumentasi terhadap sejumlah informan dengan berdasar pada prinsip-prinsip *good governance* menurut UNDP dalam menjawab rumusan masalah yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Palopo belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini terbukti dengan masih adanya keluhan dari peserta BPJS Kesehatan mengenai denda pelayanan dan iuran bagi pengguna BPJS Kesehatan di Kota Palopo.

Relevansi jurnal dengan penelitian berkaitan dengan bagaimana prinsip-prinsip *good governance* dalam instansi pemerintah/atau instansi publik. Dengan menggunakan prinsip-prinsip *good governance* menurut UNDP yakni akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum. Penelitian tersebut menjadi rujukan dalam menentukan prinsip *good governance* yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

Rujukan kedua yakni jurnal yang ditulis oleh Badrus zaman dan Diah Nurdiaty tahun 2020 dengan judul Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Kampung Baru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri). Latar belakang masalah pada penelitian ini yakni adanya pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa yang masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* di desa Kampung Baru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Implementasi prinsip *good governance* dalam pengelolaan ADD di di desa Kampung Baru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri tahun 2017-2018.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan metode pengumpulan data menggunakan wawancara informan terpercaya. Prinsip *good governance* yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah ini yakni akuntabel, transparan dan partisipatif. Hasil penelitian ini secara umum pelaksanaan alokasi dana desa sudah sesuai dengan Implementasi prinsip *good governance* yaitu akuntabel, transparan dan partisipatif, akan tetapi secara teknis masih belum terdapat hambatan yakni kurangnya pengetahuan aparatur terhadap peraturan tentang ADD yang menyebabkan keterlambatan pelaporan pengelolaan ADD di desa Kampung Baru.

Relevansi jurnal penelitian berkaitan dengan salah fokus penelitian yakni terhadap bagaimana pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Kampung Baru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Dengan menggunakan prinsip *good governance* yang sama, peneliti akan berfokus pada SIMPELBANG

Kota Bekasi dalam pengendalian dan evaluasi realisasi keuangan dan juga pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kota Bekasi

Rujukan ketiga yakni jurnal yang ditulis oleh Husni Mubaroq dan Revanggi Ayu Tantri tahun 2022 dengan judul Optimalisasi *Good Governance* dengan Program “Si Jinggo” dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Kota Probolinggo. Dalam hal pelayanan publik pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya, hal ini berkaitan dengan berbagai keluhan masyarakat seperti SOP yang rumit, pengurusan dokumen yang membutuhkan waktu lama, masih adanya pungli yang mengakibatkan pelayanan tidak efektif dan efisien. Implementasi *good governance* merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan suatu pemerintahan dengan tata kelola yang baik. Oleh sebab itu Pemerintah Kota Probolinggo membuat inovasi berupa aplikasi Si Jinggo yang digunakan dalam menghasilkan laporan dan data secara berkala dari kelurahan atau kecamatan se Kota Probolinggo yang dapat dipantau secara online.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Optimalisasi *Good Governance* dengan Program “Si Jinggo” dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Kota Probolinggo Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang diperoleh yaitu menggunakan sumber data sekunder dengan melakukan observasi secara langsung serta studi Pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Program Si Jinggo memiliki banyak manfaat guna mewujudkan *good governance*. Melalui aplikasi Si Jinggo Pemerintah Kota Probolinggo berupaya mewujudkan *good governance* secara optimal serta berbagai permasalahan yang ada diwilayah bisa teratasi.

Relevansi jurnal penelitian berkaitan dengan adanya inovasi aplikasi yang diciptakan oleh Pemerintah Probolinggo guna memecahkan permasalahan yang ada di Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Tujuan dari dibuatnya aplikasi yang berbasis *website* ini berfungsi untuk menghimpun berbagai data berbasis kewilayahan dari kecamatan dan kelurahan. Penelitian tersebut memberikan kontribusi pada peneliti bahwa SIMPELBANG merupakan inovasi aplikasi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bekasi guna memecahkan masalah yang ada sebelumnya. Pembuatan aplikasi pemerintah dengan menerapkan prinsip *good governance* sangat penting untuk memastikan bahwa layanan publik yang diberikan tidak hanya efisien, tetapi juga transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Rujukan keempat yaitu jurnal yang ditulis oleh Jali Gojali tahun 2022 dengan judul Implementasi *Good Governance* dalam Pengadaan Langsung Elektronik pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Disdikbud Kabupaten Serang. Dengan masih dilakukannya pengadaan langsung manual banyak masalah yang dihadapi seperti proses pengadaan yang tidak transparan, akuntabilitas yang kurang akurat untuk dipertanggungjawabkan, keterbatasan partisipasi masyarakat sehingga rawan kecurangan karena tidak sesuai dengan aturan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Implementasi *good governance* dalam kebijakan pengadaan langsung secara elektronik di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sudah sesuai dengan prinsip transparansi, kompetensi, akuntabilitas, partisipasi, aturan hukum dan kesetaraan. Metode yang digunakan yakni kualitatif, perolehan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menerangkan bahwa 95 % pengadaan langsung dilakukan secara elektronik. Implementasi *good governance* sudah menerapkan prinsip transparansi, kompetensi, akuntabilitas, partisipasi, aturan hukum dan kesetaraan. Hambatan yang dihadapi yakni faktor komunikasi terkait aturan hukum dan kebijakan terkait, dibutuhkan sosialisasi yang masif dan berkelanjutan sehingga mekanisme dan kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.

Relevansi jurnal penelitian yakni permasalahan yang dilatarbelakangi oleh tidak optimalnya implementasi *good governance* pada pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, dalam hal ini yakni pengadaan langsung barang dan jasa yang dilakukan secara manual. Peneliti merujuk pada latar belakang permasalahan yang sama seperti sebelum adanya SIMPELBANG , dimana proses pengendalian dan pelaporan pembangunan masih mengalami banyak kendala seperti tidak transparannya realisasi keuangan dan fisik pada SKPD, terhambatnya pengambilannya keputusan pimpinan, laporan yang masih bersifat manual dan lain sebagainya.

Rujukan kelima adalah jurnal yang ditulis oleh Azwar Anwar dengan judul Implementasi *Good Governance* dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pallawarukka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo tahun 2023. Implementasi prinsip *good governance* dalam pelaksanaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat membantu sosialisasi terkait Alokasi Dana Desa kepada warga dan mengajak keikutsertaan warga dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa maupun dalam pengawasan kegiatan pengelolaan.

Tujuan dari penelitian ini yakni mengevaluasi Implementasi *good governance* dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pallawaruka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Indikator dalam penelitian ini yakni prinsip *good governance* menurut Permendagri No 113 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan menguji keabsahan Triangulasi. Metode perolehan data yang digunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi *good governance* dalam pengelolaan ADD di Desa Pallawaruka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, telah menerapkan prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, partisipasi serta transparansi sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014. Pelaporan APBDes telah di pertanggungjawabkan dengan laporan pelaksanaan program APBDes kepada pemerintah tingkat atasnya secara periodik.

Relevansi jurnal penelitian terkait pada Implementasi *good governance* pada pengelolaan ADD yakni penelitian tersebut memberikan kontribusi kepada peneliti untuk melihat bagaimana implementasi Implementasi *good governance* menggunakan Permendagri No 113 Tahun 2014 , peraturan ini mengatur tata cara pengelolaan keuangan di tingkat daerah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Rujukan keenam yaitu jurnal yang ditulis oleh Aldy Pelu, Jusuf Madubun, Marno Wance dengan judul Peran Pemerintah dalam Mewujudkan *Good Governance* pada Pemerintah Negeri Hila Kabupaten Maluku Tengah tahun 2023.

Kurangnya akuntabilitas pelayanan publik Pemerintah Negeri Hilla yang lambat, kurang responsif dan kurangnya keterbukaan kepada masyarakat. Dengan hadirnya konsep *good governance* diharapkan mampu memberikan pengembangan pada aspek-aspek pelayanan kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan *interview*.

Adapun hasil temuan penelitian ini yakni akuntabilitas, partisipasi, penegakan hukum perlu menjadi bentuk perbaikan untuk pengembangan pembangunan Negeri Hilla. Selanjutnya, sinergitas dan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah perlu dikuatkan komunikasi kelembagaan secara berkala untuk pembangunan yang lebih baik.

Relevansi jurnal penelitian terkait pada hasil temuan penelitian dimana perlu adanya Implementasi *good governance* untuk pengembangan pembangunan Negeri Hilla. Temuan penelitian ini menjadi rujukan peneliti dalam memperoleh hasil temuan yang akan diteliti dimana perlunya ada Implementasi prinsip *good governance* meliputi akuntabilitas, partisipasi, penegakan hukum serta sinergitas pada pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan menggunakan Simpelbang di Kota Bekasi.

Rujukan ketujuh adalah jurnal yang ditulis oleh Doni Putro Cahyono dan Endang Indartuti dengan judul Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Suatu Studi tentang SILOKDES di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk tahun 2023. Latar belakang masalah pada penelitian ini yakni berfokus pada pelayanan publik. Pelayanan publik ini merupakan bentuk dari penyelenggaraan pemerintahan sebagai upaya dalam proses pemenuhan dari

bentuk kebutuhan penerima layanan maupun implemmentasi peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini prinsip *good governance* yang digunakan yaitu UNDP dalam Sedarmayanti 2009 mengatakan bahwa ada 4 unsur utama yang mencerminkan tata kelola pemerintah yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum.

Fokus dalam penelitian ini terkait bagaimana tanggung jawab pejabat pemerintah desa di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk dalam menyusun laporan keuangan desa melalui suatu aplikasi pemerintah Kabupaten Nganjuk yaitu SILOKDES dengan dianalisa mengenai menggunakan prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas dan transparansi. Hasil dari penelitian ini yaitu pemerintah desa Mancon telah menerapkan prinsip dari *Good Governance* akuntabilitas dan transparansi. Dilihat dari pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi SILOKDES , pemerintah desa Mancon sudah bisa bertanggungjawab dan transparan dalam pelaporan keuangan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Relevansi jurnal penelitian terkait pada fokus penelitian yakni pelaksanaan dan pelaporan keuangan menggunakan aplikasi SILOKDES. Penelitian tersebut memberikan kontribusi terhadap Implementasi prinsip *good governance* pada penggunaan aplikasi didalam penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi aplikasi Simpelbang pada pemerintah Kota Bekasi digunakan untuk proses pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan secara digital yang selanjutnya dianalisa menggunakan prinsip *good governance* antara lain transparansi dan akuntabilitas.

Rujukan kedelapan adalah jurnal berjudul Efektivitas Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (*E-Controlling*) pada Bagian Evaluasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bontang oleh Maghfiroh tahun 2016. Sistem informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (*E-Controlling*) yang dibangun oleh Pemerintah Kota Bontang pada dasarnya harus akurat, tepat waktu, dan fleksibel sehingga hal ini akan menunjang kegiatan penyelenggaraan dan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisa serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat Efektivitas Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (*E-Controlling*). Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu telah berjalan dengan baik sistem pelaporannya, hal ini dibuktikan dengan adanya tahapan tahapan dalam sistem yang mudah sehingga memperlancar dalam pengimplementasian dan penyajian laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan bersifat *real time*.

Relevansi terkait penelitian yakni pada lokus dan fokus permasalahan yang melatarbelakangi adanya Sistem informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi (*E-Controlling*) yang dibangun oleh Pemerintah Kota Bontang. Peneliti merujuk pada jurnal tersebut karena melihat bahwa adanya kesamaan terkait sistem yang dibangun oleh Pemerintah Kota Bekasi, dimana keduanya memiliki tujuan yang sama yakni memperlancar penyajian laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan bersifat *real time*.

Rujukan kesembilan yaitu jurnal yang ditulis oleh Andi Ni'mah Sulfiani tahun 2018 dengan judul Efektivitas Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Program

Pembangunan Pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palopo. Monitoring dan evaluasi ada 2 unsur yang terkait dalam rangka pengendalian suatu program. Keduanya seharusnya berjalan beriringan secara efektif agar menghasilkan laporan pengendalian yang sesuai dan tepat waktu.

Beberapa permasalahan yang masih ada pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palopo terkait pelaksanaan tupoksi pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan yakni keterlambatan waktu pelaporan, penyusunan tidak sesuai dengan format dan kurangnya disiplin pegawai.

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelaporan monitoring dan evaluasi program pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palopo. Metode penelitian yang digunakan yakni deskriptif kualitatif dengan menganalisa data kualitatif yang didapatkan oleh peneliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan kriteria keefektifan organisasi menurut John P Campbell, efektivitas dalam pelaporan monitoring dan evaluasi pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palopo masih kurang efektif.

Relevansi jurnal terkait penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni terkait efektivitas pelaporan monitoring dan evaluasi pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan yang kemudian dianalisis dengan kriteria keefektifan organisasi menurut John P Campnell. Variabel yang digunakan antara lain: keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output dan pencapaian tujuan menyeluruh. Teori menurut John P

Campnell tersebut memberi kontribusi untuk menjawab rumusan masalah terkait efektivitas penggunaan Simpelbang pada Pemerintah Kota Bekasi.

Rujukan kesepuluh yakni jurnal yang ditulis oleh Iqbal Rafiqi, Nur Hidayah Selviyanti, Istianah, Layyinah, Siti Halimah, Nur Eka Muthmainah, Dianawati, Nurul Annisa tahun 2024 dengan Judul Efektivitas Implementasi *e-Budgeting* dalam Mewujudkan *Good Governance* dengan Model CIPP (Studi Kasus pada Kota Surabaya). Latar belakang masalah yang diangkat dalam penelitian ini yakni dengan adanya data yang menunjukkan bahwa belum maksimalnya nilai Indeks Pembangunan *e-Government*, untuk meningkatkan indeks tersebut Pemerintah Kota Surabaya mewujudkan *e-Government* melalui *e-Budgeting* yang digunakan untuk proses penganggaran secara keseluruhan di Pemerintah Kota Surabaya.

Relevansi terkait jurnal penelitian yakni adanya indikator efektivitas penggunaan aplikasi *e-Budgeting* dalam rangka mewujudkan *e-Government* yang sesuai dengan asas-asas *good governance*. Salah satu masalah yang melatarbelakangi penelitian menjadi rujukan peneliti dalam menyusun penelitian yakni rendahnya Indeks Pembangunan *e-Government* dan belum maksimalnya sistem informasi dalam proses pengelolaan pemerintahan sehingga menyebabkan tidak adanya efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Bekasi.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas implemementasi *e-budgeting*, proses operasionalnya dan bagaimana evaluasi dalam pemenuhan asas *good governance* dengan metode CIPP. Metode penelitian yang dilakukan yakni pendekatan kualitatif deskriptif melalui penilaian

model CIPP dalam mewujudkan *good governance* yang dilakukan dengan *planning, conducting and reporting*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-budgeting* pada Pemerintah kota Surabaya layak untuk dilanjutkan karena terbukti berjalan secara efektif bila ditinjau dari sembilan asas *good governance* dengan model penilaian empat komponen CIPP.

Penelitian yang sudah ada sebelumnya membahas mengenai implementasi *good governance* pada pelayanan publik pada Masyarakat (Sulfiani, 2020; Mubaroq et.al, 2022; Zaman et.al, 2020). Selain itu juga penelitian sebelumnya membahas tentang penerapan *good governance* pada program yang digunakan untuk pelayanan publik pada masyarakat (Gojali, 2022; Anwar, 2023.). penelitian sebelumnya juga membahas tentang hambatan dan kendala penerapan prinsip *good governance* (Pelu et.al, 2023; Anwar, 2023). Pada penelitian yang lain terdapat pembahasan terkait efektivitas penerapan *good governance* (Maghfiroh, 2016; Sulfiani, 2018). Ada juga penelitian terdahulu yang membahas evaluasi penerapan *good governance* (Rafiqi et.al, 2024).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian sebelumnya ada yang hanya meneliti penerapan prinsip *good governance* dengan hanya beberapa indikator saja. Selain itu juga mendeskripsikan implementasi *good governance* hanya pada pelayanan publik baik program maupun aplikasi saja. Penelitian sebelumnya juga belum mendeskripsikan indikator *good governance*, efektivitas penggunaan teknologi serta persepsi penggunaan teknologi secara keseluruhan. Penelitian ini membahas bagaimana implementasi *good governance* sesuai dengan prinsip yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2009), selanjutnya

membahas tentang bagaimana efektivitas penggunaan Simpelbang dan persepsi penggunaan Simpelbang secara keseluruhan.

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penelitian dalam kajian Ilmu Administrasi Negara, khususnya dibidang Studi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan dalam memberikan suatu informasi baik keberhasilan maupun kegagalan dari suatu program yang dilaksanakan dan sudah terlaksana di masing-masing daerah.

Beberapa jurnal penelitian yang sebelumnya sudah ditulis oleh para peneliti diharapkan bisa menjadi panduan peneliti untuk menentukan aspek- aspek yang perlu diperhatikan pada Implementasi *good governance* pada penyelenggaraan pemerintahan, khususnya Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Peneliti berharap pada penelitian ini mampu memberi masukan kepada Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* pada Sistem Pelaporan Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Bekasi sebagai wadah monitoring, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan yang lebih efektif, efisien dan akuntabel sehingga bisa lebih baik di masa mendatang.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Beragam temuan penelitian diharapkan bisa digunakan untuk memberikan rekomendasi aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam Implementasi *good governance*, khususnya pada Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Penelitian ini diharapkan memberi masukan kepada Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam segala sektor penyelenggaraan pemerintahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam hal penulisan proposal penelitian yang berjudul Implementasi *Good Governance* pada Sistem Pelaporan Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Bekasi, peneliti menyusun sistematika penulisan dalam 3 (tiga) bab yakni :

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini menjelaskan masalah yang diangkat oleh peneliti. Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, mengamanatkan kepada pemerintah daerah dalam mengoptimalkan efektivitas penggunaan *e-Government*, Pemerintah Daerah Kota Bekasi dalam pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang dimaksud telah mengembangkan Sistem Pelaporan Pembangunan (SIMPELBANG), pengembangan ini juga seharusnya tetap memperhatikan prinsip-prinsip *good governance* seperti yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2009) bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus menganut prinsip-prinsip : akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum. Tertera juga pada bagian menimbang Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan/Sub Kegiatan Pembangunan Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Bekasi melalui Sistem Pelaporan Pembangunan, disebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan pelaksanaan program pembangunan yang efektif, efisien dan tepat paada targetnya diperlukan administrasi pelaksanaan pembangunan yang tertib pada peraturan serta memperhatikan prinsip *good governance*.

Bab II Kerangka Teori

Dalam hal menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, dasar teori yang digunakan oleh peneliti yakni indikator efektivitas oleh Siagian dan teori mengenai prinsip-prinsip *Good Governance* yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2009) yaitu : akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab ini menerangkan metode yang dijalankan oleh peneliti dalam memperoleh suatu data seperti paradigma penelitian; metode penelitian; desain penelitian; sumber dan teknik perolehan data; teknik analisis data; *goodness* dan *quality criteria*, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, dan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu metode penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivisme. Teknik perolehan data primer dengan menggunakan wawancara dan pengamatan langsung. Perolehan data informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan peneliti memilih strategi penelitian yaitu studi kasus.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang temuan-temuan dari hasil penelitian yang telah dilakukan tentang “ Implementasi *Good Governance* Sistem Pelaporan Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Bekasi”.

Bab V Kesimpulan

Dalam bab ini dipaparkan kesimpulan dari peneliti dan saran yang dapat disampaikan terkait hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

Daftar Pustaka

Daftar pustaka berisi tentang kutipan buku, jurnal, peraturan, produk hukum, alamat website yang menjadi referensi untuk penulis.

Lampiran

Lampiran berisi kumpulan bukti dokumen, maupun surat serta dokumentasi saat melakukan kegiatan wawancara, pengajuan surat dan lain-lain.